1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Kota Sukabumi pada bulan april mengalami inflasi (mtm) month to month 2026 sebesar 0.04% sedangkan Jawa Barat mengalai deflasi sebesar -0,07% .ntuk bulan april secara umum (mtm) month to month komoditas yang dominan memberi andil sumbangan Inflasi di kota sukabumi antara lain : minyak goreng, tahu mentah, telepon seluler, nasi dengan lauk, kangkung, kasur, jengkol, daging sapi, kopi bubuk, air kemasan, sedangkan pada bulan Mei mengalami inflasi (mtm) month to month 2026 sebesar 0.14% .untuk bulan Mei secara umum (mtm) month to month komoditas yang dominan memberi andil sumbangan Inflasi di kota sukabumi antara lain : Bawang Merah, Cabai Merah,Jeruk, Sate, Telepon Seluler, Minyak Goreng, Kangkung, Pepaya, Sawi Hijau, Cabai Rawit. sedangkan pada bulan juni Kota Sukabumi mengalami inflasi (mtm) month to month 2026 sebesar 0.18%untuk bulan Juni secara umum (mtm) month to month komoditas yang dominan memberi andil sumbangan Inflasi di kota sukabumi antara lain : bensin, Bawang merah, sigaret kretek tangan (skt), laptop/notebook, wortel, daging sapi, tomat, air teh kemasan, mesin cuci

   Sedangkan Inflasi Kota Sukabumi pada bulan juni (yoy) year on year 2026 sebesar 2,71% sedangkan Jawa Barat sebesar 3,08% dan nasional sebesar 3,44%. komoditas yang dominan memberi andil sumbangan inflasi year on year (yoy) juni 2026 kota sukabumi antara lain : Emas Perhiasan, Minyak Goreng, Daging Ayam Ras, Bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (Skm), Kontrak Rumah, Tahu Mentah, sigaret kretek tangan, Martabak

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kenaikan harga yang terjadi selama triwulan II 2026 yaitu:
   1.Meningkatnya harga BBM Non Subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95 pada Juni 2026; 2. Pasca hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beberapa komoditas pangan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit mengalami penurunan harga;
   3. Harga emas di pasar global menujukkan tren penurunan dibandingkan pada Triwulan-I.
   4. Fluktuasi harga komoditas pangan, seperti cabe rawit, cabe merah, dan bawang merah,yang tidak terkait dengan jumlah ketersediaan (supply) maupun tingkatkebutuhan/permintaan (demand);
   5. Kondisi stabilitas ekonomi dan politik global yang mempengaruhi harga komoditas;
   6. Siklus tahunan seperti Tahun Ajaran Baru Sekolah juga sering menjadi penyumbang inflasi non-pangan

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Berbagai upaya pengendalian inflasi di Kota Sukabumi pada Triwulan II Tahun 2026 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi melalui strategi 4K diantaranya : 1 Keterjangkauan Harga : Diskumindang melakukan operasi pasar dan bazar murah di 7 kecamatan, Melakukan pemantauan harga harian komoditas kebutuhan pokok masyarakat di 2 pasar tradisional, melakukan GPM HBKN Idul Adha dibulan april, mei dan juni. 2 Ketersediaan pasokan :

Pengelolaan Stok Pangan berupa Cadangan Pangan Pemerin Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan ketersediaan pangan saat terjadi kekurangan atau bencana alam, Monitoring harga/Sidak Pasar Dalam upaya mendukung ketahanan pangan daerah dan mendorong kemandirian sektorpertanian, 3 Kelancaran Distribusi :Pengamanan alur logistik/distribusi hewan ternak hewan ternak saat HBKN idul adha,, Pemantauan ketersediaan bahan pangan di tingkat distributor yang dilaksanakan secara rutin. 4. Komunikasi Efektif : Mengikuti Rakor TPID seluruh kabupaten/kota se-Indonesia yang dipimpin oleh Kemendagri RI dan dilaksanakan pada hari Senin setiap minggunya. Penyampaian Laporan Silinda Jabar , Capacity Building TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Kota Sukabumi secara umum belum cukup signifikan dalam menekan laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal
yang perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi ke depannya seperti:
1. Koordinasi antara stakeholder yang berperan sebagai penentu kebijakan publik perlu lebih ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terintegrasi dan dapat memberikan solusi kepada persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien;
2. Kegiatan yang dilaksanakan selama ini hanya menyasar pada persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek. Belum menjawab persoalan jangka panjang;
3. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional karena kenaikan harga setiap tahun berulang terus;
4. Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian semua pihak. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Kota Sukabumi dalam pengendalian inflasi selama periode triwulanII 2026 diantaranya: 1 Mengintensifkan Pemantauan Pergerakan Harga Secara Harian; Melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok secara harian Lebih lanjut, memanfaatkan Aplikasi Silinda di Jabar untukmelakukan pemantauan kenaikan/penurunan harga pangan untuk pengambilan kebijakan yang lebih responsif dan cepat. 2. Agar masyarakat lebih aware terhadap program pengendalian inflasi yang dilakukan, penyelenggaraan program Bazaar Murah yang bekerja sama dengan Ritel yang ada di Kota Sukabumi dalam rangka memastikan efektivitas penetapan lokasi, waktu dan frekuensinya perlu koordinasi yang lebih intens dengan TPID. 3. koordinasi stock dan monitoring dengan kementerian, Provinsi, Bulog dan BI 4. Perlu untuk melaksanakan koordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas guna membahas kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax serta menilai dampak yang
ditimbulkan. Penting untuk membahas terkait pengelolaan kuota fakultatif BBM subsidi di Kota Surakarta serta langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.